

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Perkembangan Etnis Tionghoa

Sejatinya kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia memiliki historis yang sangat panjang, serta kedudukan mereka sangat dipengaruhi oleh kekuatan pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Dari sekian banyak masalah-masalah yang timbul pada etnis Tionghoa pun merupakan hasil dari kelanjutan masalah yang terjadi ketika masa pemerintahan kolonial berlangsung. Selain itu, tipe kebijakan yang pernah diterapkan oleh rezim yang pernah berkuasa terhadap etnis Tionghoa, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru, sesungguhnya kebijakan yang diterapkan kepada etnis Tionghoa tersebut merupakan sebuah lanjutan dan tidak jauh berbeda dari yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, bahkan dapat dikatakan penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru tersebut masih dalam motif yang serupa.

Tinjauan mengenai kesamaan latar belakang penerapan kebijakan pemerintah Orde Baru dengan pemerintah kolonial tersebut dapat dilihat dari atas dasar apa kebijakan tersebut dikeluarkan. Pemerintah kolonial dalam menerapkan suatu kebijakan terhadap etnis Tionghoa didasari atas kepentingan kekuasaan, tentu saja keahlian orang-orang Tionghoa dalam perekonomian menjadi salah satu alasan dan kepentingan utama dalam memberdayakan mereka. Kepentingan kekuasaan tersebut kemudian mempengaruhi aspek kehidupan lainnya, yakni kehidupan perekonomian dan sosial budaya. Sebagaimana yang diungkapkan Wibowo (tanpa tahun, hlm. 644) bahwa konstruksi sosial berkait erat dengan beberapa faktor dominan diantaranya adalah kepentingan, relasi kuasa, ekonomi dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Dahana (1998) bahwa:

Pemerintah pasca kemerdekaan pada hakikatnya meneruskan kebijaksanaan segegrasi Pemerintah Hindia Belanda, yang memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada golongan etnis Tionghoa dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, sedangkan kegiatan kaum pribumi dibatasi pada birokrasi

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan pertanian. Akibatnya, terciptalah suatu garis pemisah antara pribumi dan nonpribumi. Dan walaupun terjadi komunikasi antara kedua golongan ini, kontak tersebut terbatas pada hubungan antara penjual dan pembeli atau pemilik uang atau pengutang. Pola semacam itu masih berlaku sampai sekarang, terutama di kalangan masyarakat bawah (hl, 55).

Pada masa pemerintahan kolonial, politik pemisahan sudah dilakukan yaitu menjadi tiga golongan yang merujuk kepada terjadinya stratifikasi sosial dalam tubuh masyarakat. Pertama, yaitu golongan Eropa khususnya Belanda, kedua golongan Timur Asing, dan yang terakhir adalah masyarakat pribumi. Terdapat beberapa faktor dalam penerapan politik pemisahan tersebut, di samping untuk memudahkan pengawasan administrasi sipil, pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan propaganda pemerintah kolonial untuk menjauhkan hubungan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Setiono (2008) mengungkapkan bahwa:

Belanda pun mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dan peraturan yang bertujuan memisahkan etnis Tionghoa dengan penduduk setempat. Antara lain dengan mengeksklusifkan tempat tinggal mereka dan memberi orang-orang Tionghoa hak-hak untuk memungut pajak, menjual candu, dan membuka rumah judi yang sangat merugikan penduduk setempat. Membagi-bagi kedudukan hukum penduduk Indonesia dengan dasar yang sangat rasial. Antara lain dengan menempatkan posisi etnis Tionghoa sebagai warga *vreemde-oosterlingen* (timur asing) lebih tinggi dari golongan *inlander* atau pribumi. (hlm. 83).

Terlebih kemampuan dalam bidang perekonomian yang dimiliki oleh orang Tionghoa tersebut membuat kedudukan mereka seakan menjadi kepercayaan pemerintahan. Hal tersebut kemudian memunculkan stigma dan label lainnya mengenai etnis Tionghoa, disamping stigma positif mereka sebagai motor perekonomian, namun di sisi lain stigma negatif pun tertuju kepada kelompok ini, khususnya dari kalangan pribumi. Label sebagai antek-antek kolonial melekat pada kelompok etnis Tionghoa, selain itu kecemburuan sosial terhadap etnis Tionghoa ini muncul yang berujung pada masalah diskriminasi sosial. Selain itu mengenai orientasi politik mereka yang cenderung berubah-ubah semakin menimbulkan sikap tidak percaya masyarakat pribumi, yang kemudian berdampak kepada permasalahan kewarganegaraan mereka setelah memasuki era kemerdekaan. Di

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

satu sisi, pemerintah kolonial tidak membiarkan etnis Tionghoa untuk bergerak di bidang politik. sebagaimana yang dijelaskan oleh Suhandinata (2009) bahwa:

Di satu sisi kedua pihak berwenang tersebut memberi kebebasan di bidang ekonomi dan budaya, tapi di sisi lain mereka membatasi lingkup gerakan mereka, khususnya di bidang nonekonomi. Latar belakang kebijakan tersebut sangat kentara. Pemerintah VOC dan kolonial Belanda khawatir kalau warga Tionghoa diberi kebebasan dalam politik. ketakutan tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-19 akhir hingga awal abad ke-20 selama gerakan nasionalisme yang diketuai oleh Dr. Sun Yat Sen. Pendiri Republik dan Demokrasi di China disambut hangat oleh Tionghoa perantauan (hlm. 309).

Gaya penerapan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tersebut seperti dilakukan kembali oleh penguasa-penguasa periode setelahnya, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto memilih kebijakan asimilasi sebagai jalan yang dianggapnya paling tepat untuk memecahkan persoalan Tionghoa di Indonesia. Konstruksi sosial milik Berger yang terjadi pada pemerintahan kolonial terlihat terulang kembali pada masa pemerintahan Orde Baru ini. Adanya sebuah kepentingan dari diterapkannya kebijakan dari dominasi penguasa pada akhirnya kembali memunculkan masalah karena adanya kekeliruan dalam menerapkan kebijakan tersebut, khususnya pada masalah ekonomi dan kebudayaan. Kebijakan asimilasi menuntut adanya pembauran total masyarakat Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi dengan menghilangkan segala ciri dan identitas Tionghoa mereka. Sesungguhnya arah dari kebijakan ini ialah untuk membentuk suatu masyarakat multikulturalisme, sesuai dengan dasar masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Kekeliruan tersebut terjadi atas pemilihan jenis asimilasi yang diterapkan, yaitu asimilasi inkorporasi. Donald Horowitz (dalam Suryadinata, 2003, hlm. 6) membedakan dua jenis asimilasi, yaitu: inkorporasi dan amalgamasi. Kemudian Glazer & Moynihan (dalam Suryadinata, 2003, hlm. 6) mengungkapkan bahwa asimilasi inkorporasi berarti bahwa kelompok tertentu mengambil identitas kelompok yang lainnya, sedangkan yang kedua berarti dua kelompok atau lebih yang digabung untuk membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemilihan tersebut bertolak belakang dengan Indonesia yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” di mana seluruh suku, ras, maupun etnis diakui keberadaannya dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Pada kasus asimilasi etnis Tionghoa ini, kebudayaan mereka dianggap sebagai kebudayaan asing yang kemudian mengharuskan mereka meninggalkan kebudayaannya tersebut, namun pada pelaksanaannya pun hal tersebut kembali menimbulkan masalah. Selain itu pada bidang ekonomi, rasa kecemburuan sosial masih tetap melekat terhadap golongan etnis Tionghoa. Sehingga menjadikan posisi mereka semakin terasing dengan segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan melalui kebijakan yang dikeluarkan.

2.2 Stereotip dan Etnosentrisme Etnis Tionghoa di Indonesia

Kata “*stereotype*” sendiri berasal dari dua rangkaian kata Yunani, yaitu *stereos*, yang bermakna “*solid*”, dan *typos*, bermakna “*the mark of a blow*,” atau makna yang lebih umum yaitu “*a model*” (Schneider, 2004, hlm. 8). Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Lippman (dalam Supardan, 2011, hlm. 208) bahwa stereotip biasanya didefinisikan sebagai generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok atau kelas manusia yang menjurus ke hal-hal negatif ataupun tidak menguntungkan, meskipun beberapa penulis juga memasukkan konsep stereotip positif.

Berkaitan dengan masalah etnis Tionghoa di Indonesia, stereotip menjadi salah satu konsep utama yang melatarbelakangi munculnya masalah-masalah Tionghoa di Indonesia. Stereotip muncul sebagai akibat persepsi yang dimiliki masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa tersebut. Munculnya stereotip tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis etnis Tionghoa di Indonesia itu sendiri. Adanya politik pemisahan yang dilakukan pemerintah kolonial yang mengistimewakan etnis Tionghoa memunculkan rasa tidak percaya masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa bahwa mereka berpihak kepada kaum penjajah. “Antara lain dengan menempatkan posisi etnis Tionghoa sebagai warga *vreemde-oosterlingen* (timur asing) lebih tinggi dari golongan *inlander* atau pribumi”
Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Setiono, 2008, hlm. 83). Selain itu, adanya tiga orientasi politik dan nasionalisme juga menjadi pemicu munculnya stereotip. Perbedaan aliran politik dan nasionalisme tersebut diantaranya ialah yang berorientasi ke Tiongkok, berorientasi ke Belanda, dan berorientasi ke Indonesia. Hal tersebut membuat mereka menunjukkan tidak adanya konsistensi yang menunjukkan loyalitasnya sebagai penduduk Indonesia. Rasa tidak percaya tersebut berlanjut melihat sifat eksklusif dan superioritas yang dimiliki etnis Tionghoa, Sebagaimana yang diungkapkan oleh Coppel (1994) bahwa:

Orang Tionghoa itu suka berkelompok-kelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri. Mereka selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negeri leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia, dalam keadaan paling baik meragukan, dalam keadaan paling buruk, bersikap bermusuhan dengan Indonesia. Orang Tionghoa yang tampaknya memihak kepada Indonesia tidak bersungguh-sungguh hati, mereka hanya berpura-pura melakukan itu demi alasan-alasan oportunistis, ketimbang perasaan yang sebenarnya untuk memihak negara dan rakyat mereka (hlm. 26).

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu utama munculnya stereotip tersebut dengan melihat fakta bahwa etnis Tionghoa lebih unggul dalam bidang perekonomian ketimbang masyarakat pribumi itu sendiri. Etnis Tionghoa yang dianggap berhaluan kiri karena memiliki kedekatan dengan partai-partai bersayap kiri, hal tersebut menyebabkan etnis Tionghoa tidak dipercaya dalam bidang politik. Menurut Miller (dalam Schneider, 2004, hlm. 8) bahwa stereotip tersebut mengandung konotasi, yaitu ketakutan (*rigidity*) dan salinan atau kesamaan (*duplication or sameness*), dan ketika diaplikasikan kepada orang, stereotip merupakan sesuatu yang kaku, dan stereotip tersebut menunjuk atau mengecap kepada semua orang yang dituju dengan karakteristik yang sama. Hal tersebut berkenaan dengan apa yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi cenderung melihat etnis Tionghoa sebagai suatu kelompok yang memiliki kesamaan sifat dan tingkah laku, hal tersebut menyebabkan masyarakat pribumi memiliki rasa tidak aman (*insecurity*) terhadap etnis Tionghoa tersebut. Namun pada kenyataannya, jika ditinjau dari kebudayaan

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

etnis Tionghoa di Indonesia, sesungguhnya mereka merupakan kelompok yang heterogen.

Interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi sesungguhnya telah terjadi sejak berabad-abad lampau di berbagai daerah di Indonesia. Hubungan interaksi tersebut menimbulkan pembauran antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Interaksi dan pembauran tersebut menyebabkan terjadinya perkawinan campuran bahkan perpindahan agama. Jika ditinjau dari segi golongan, mereka terbagi menjadi dua, yaitu peranakan dan totok.

- a. *Peranakan*, umumnya sudah lama tinggal di Indonesia dan menikahi orang-orang pribumi, serta telah banyak menyerap kebudayaan pribumi bahkan berperilaku seperti pribumi.
- b. *Totok*, ialah orang Tionghoa “asli” yang belum lama tinggal di Indonesia dan masih berbahasa Tionghoa dan cenderung menghindari perkawinan campuran dengan pribumi untuk mempertahankan keasliannya tersebut. Namun pada dewasa ini, orang Tionghoa totok sudah tidak ditemukan lagi karena kebanyakan dari mereka telah mengalami masa peranakanisasi.

Dalam bidang agama, mayoritas orang Tionghoa memeluk agama Buddhisme, Konghucu, Kristen dan Katolik, dan Islam. Munculnya stereotip di kalangan Etnis Tionghoa ini lah yang kemudian memunculkan berbagai masalah. Etnis Tionghoa tetap dianggap sebagai orang asing, meskipun diantaranya telah melakukan pembauran dan mengakui Indonesia sebagai negaranya. Berbagai masalah muncul mencakup hampir seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, posisi dan kedudukan mereka tergantung kepada pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memecahkan segala permasalahan Tionghoa yang ada dengan segala kebijakan yang dikeluarkan, terutama tentang pembauran total. Penyelesaian masalah Tionghoa tersebut telah dilakukan sejak zaman pemerintahan Soekarno. Tidak terlepas ketika Indonesia mulai memasuki pemerintahan Orde Baru, etnis Tionghoa pun masih menjadi sorotan. Pemerintah berupaya bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun begitu, stereotip etnis Tionghoa tidak dapat dengan mudah dihilangkan, terlebih di samping upaya
Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintah Orde Baru dalam melakukan pembauran, mereka mendapatkan perlakuan istimewa dalam bidang ekonomi yang menyebabkan stereotip itu masih tetap ada.

Di samping stereotip yang melekat pada kelompok etnis Tionghoa, hal lain menjadi pemicu terjadinya masalah ialah adanya sikap etnosentrisme di kalangan etnis Tionghoa itu sendiri yang kemudian memunculkan stereotip kembali di mata masyarakat pribumi. Akan tetapi, kedua kelompok ini sesungguhnya saling mengstereotipkan satu dengan yang lain. Dahana (1998) menjelaskan bahwa:

Simaklah pendapat pribumi terhadap nonpribumi: oportunistis, hanya mencari untung, tak patriotis karena selalu berorientasi ke Cina atau Taiwan, tak punya komitmen, kaya. Eksklusif, tukang makan daging babi, dan sebutan negatif lainnya. Sementara itu stereotype nonpribumi terhadap pribumi tak kurang buruknya: pemalas, hidupnya cuma cari kesenangan, mau cari untung tanpa keluar keringat, bodoh, pemerias, dan sebutan lain yang tentu saja sangat negatif (hlm. 54).

Etnosentrisme merupakan sebuah konsep yang biasanya terjadi pada kelompok etnis atau golongan masyarakat tertentu, perasaan etnosentrisme muncul ketika salah satu kelompok atau individu yang merupakan bagian dari kelompok tersebut menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok lainnya. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Barger (2017) bahwa *ethnocentrism is a commonly used word in circles where ethnicity, inter-ethnic relations, and similar social issues are of concern. The usual definition of the term is "thinking one's own groups's ways are superior to others" or "judging other groups as inferior to one's own.*

Lantemari (2010) mengungkapkan mengenai konsep etnosentrisme yang dijelaskan oleh Sumner bahwa etnosentrisme berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial yang kemudian dapat menjadi sebuah kompetisi sosial. *"Ethnocentrism was defined by William Graham Sumner in 1906. He regarded ethnocentrism as a universal syndrome, typical of human nature, functionally related to the formation of social groups and to group-competition"* (Lantemari, 2010, hlm. 3). Pembentukan etnosentrisme yang dapat menimbulkan konflik antara

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kelompok sosial tersebut dapat ditinjau dari adanya perasaan *in-group* dan *out-group*. Berikut pengertian *in-group* dan *out-group* oleh Soekanto (1986) yang mengungkapkan adanya relasi antara perasaan *in-group* dan *out-group* dengan etnosentrisme:

Sikap-sikap *in-group* pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompok. Sikap-sikap *out-group* selalu ditandai dengan suatu antagonism atau antipasti. Perasaan *in-group* dan *out-group* atau perasaan dalam serta luar kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan *ethnocentrisme* (hlm. 111).

Pada kasus etnis Tionghoa di Indonesia, etnosentrisme sangat jelas terlihat. Hal tersebut berkenaan dengan bagaimana persepsi orang Tionghoa terhadap pribumi yang nantinya memunculkan stereotip bagi masyarakat pribumi tersebut. Salah satu masalah krusial kedudukan mereka ialah bahwa mereka sulit untuk berbaur, faktor yang mendorong hal tersebut ialah orang Tionghoa menganggap masyarakat pribumi memiliki sifat yang suka memilih-milih dan sinkretis. Hal tersebut ditinjau dari persepsi mereka terhadap agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat pribumi. Menurut Skinner (dalam Coppel, 1994, hlm. 34) orang sering mengatakan bahwa satu aspek dari kebudayaan pribumi yang dapat memperbaharui sebageaian besar dari orang Tionghoa sepanjang sejarah pemukiman mereka disini adalah agama Islam. Pada arti lain bahwa salah satu cara untuk beralkulturasi ialah dengan mengenal lebih dekat agama Islam. Namun, meskipun mereka telah hidup sejak berabad-abad lalu, nyatanya alkulturasi dan pembauran dalam bidang agama khususnya agama Islam, merupakan hal yang sulit untuk dilakukan bagi etnis Tionghoa. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa peraturan dalam agama Islam yang sulit untuk dilakukan oleh orang Tionghoa kala itu, diantaranya ialah larangan makan daging babi dan setiap laki-laki diwajibkan untuk melakukan sunat. Selain itu, adanya status kaum Islam abangan dan status sosial rendah dari masyarakat pribumi, menyebabkan timbulnya anggapan dari orang Tionghoa bahwa masyarakat pribumi kedudukannya lebih rendah daripada

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

golongan Tionghoa ditinjau dari aspek kultural. Hal tersebutlah yang menimbulkan etnosentrisme etnis Tionghoa dan stereotip bagi masyarakat pribumi.

2.3 Identitas Etnis Tionghoa

Identitas sejatinya merupakan ciri-ciri atau jati diri seseorang. Menurut Liliweri (2007) mengungkapkan bahwa:

Secara etimologi kata Identitas berasal dari kata *identity* yang berarti: 1) kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, mirip satu sama lain; 2) kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama diantara dua orang atau dua benda; 3) kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama diantara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda; 4) menunjukkan tentang suatu kebiasaan untuk memahami identitas dengan kata “identik” (hlm. 67).

Jika konsep identitas tersebut dilekatkan kepada konsep etnis maka hal tersebut akan menjadi kompleks. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaplan (dalam MacDonald, 2006, hlm. 153) bahwa etnisitas merupakan sebuah konsep yang kompleks, memiliki ciri dan pandangan yang berbeda-beda di dalam mengartikan diri. Biasanya diasosiasikan dengan perilaku kebudayaan, contohnya pada bahasa, adat istiadat, keyakinan, sejarah, pakaian dan budaya materi. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian identitas tersebut bahwa identitas memiliki cakupan yang luas. Identitas tidak selalu mengenai individu, namun juga kelompok dan benda, termasuk jika dilekatkan pada cakupan etnisitas.

Etnis Tionghoa sebagai subjek utama dalam penelitian ini pun tidak terlepas dari masalah identitas yang dimilikinya. Mereka mempertahankan kebudayaan leluhur yang dimilikinya tersebut sebagai simbol-simbol atau ciri khas kelompok. Namun pada kasus di Indonesia, identitas etnis Tionghoa berjalan sangat dinamis. Identitas yang dimiliki etnis Tionghoa tidak begitu saja dapat diterima, hal tersebut bahkan cenderung menimbulkan beberapa masalah. Penentuan identitas etnis Tionghoa di Indonesia juga bergantung kepada nuansa kebijakan politik pemerintah yang berkuasa.

Sejak era kemerdekaan, masalah identitas etnis Tionghoa merujuk kepada permasalahan kewarganegaraan. Mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia memiliki

Levia Chesiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kewarganegaraan ganda atau yang biasa disebut sebagai dwi kewarganegaraan. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru, permasalahan tersebut masih menjadi sorotan, serta krisis identitas ini menemui titik puncak dimana etnis Tionghoa diminta untuk meninggalkan identitas ke-*tinghoa*-annya.

Identitas menjadi masalah yang sangat krusial dari kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Adanya stigma bahwa etnis Tionghoa adalah orang asing dan dianggap sebagai “ancaman” karena mereka dianggap tidak memiliki loyalitas kepada Indonesia, serta latar belakang historis yang panjang menyebabkan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Berbagai peraturan dan kebijakan telah diterapkan oleh penguasa atau pemerintah yang berkuasa, mayoritas kebijakan yang diterapkan ialah merujuk kepada proses pembauran. Etnis Tionghoa yang memiliki identitas berbeda dengan masyarakat pribumi dianggap menjadi satu faktor utama dari permasalahan yang ada. Identitas dianggap penting karena hal tersebut merupakan ciri dari suatu kelompok tertentu. Sejalan dengan dikemukakan oleh Jones (dalam Liliweri, 2007, hlm. 14) bahwa etnis atau kelompok adalah sebuah himpunan manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur, atau karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa bahkan peran dan fungsi tertentu.

Asas kesamaan menjadi tujuan utama dalam pemecahan masalah identitas etnis Tionghoa ini, yang kemudian melahirkan ide pembauran agar kesamaan kultur dapat tercapai. Namun yang menjadi pertanyaan besar ialah apakah hal tersebut dapat dilakukan, mengingat bahwa etnis Tionghoa memiliki ciri khasnya tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Pada periode pemerintahan Orde Baru ini pula lah kasus identitas etnis Tionghoa tengah diuji serta mengalami banyak tekanan, khususnya dari pemerintah yang berkuasa itu sendiri.

2.4 Eksklusifitas

Konsep eksklusifitas erat kaitannya dengan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia. Barida (2007, hlm. 1405) mengungkapkan bahwa eksklusifitas merupakan keadaan dimana individu tidak mau memahami keadaan di

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sekelilingnya, mengunggulkan harga dirinya dan golongannya dengan menjatuhkan harga diri golongan yang berbeda dengan dirinya, tidak mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada, dan senantiasa menomorsatukan dirinya dan golongannya dalam setiap aspek kehidupan.

Sifat eksklusifitas ini seringkali menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Seperti pada kasus etnis Tionghoa di Indonesia, sifat eksklusifitas tersebut tidak dapat dihindarkan dari kelompok ini, terutama pada masa sebelum era kemerdekaan. Eksklusifitas ini terbentuk sejak pemerintahan kolonial, yaitu dengan adanya sistem penggolongan perkampungan berdasarkan etnis yang dikenal sebagai *wijkenstelsel*. Pada awalnya pemusatan pemukiman berdasarkan etnis ini memiliki tujuan untuk memisahkan warga jajahannya agar mudah untuk diawasi, bahkan untuk keluar dari wilayah tersebut pun orang Tionghoa harus memiliki izin dari pemerintah kolonial yang disebut *passenstelsel*. Penerapan peraturan tersebut kemudian memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan di kalangan etnis Tionghoa itu sendiri, baik dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak positif yang terlihat ialah terbentuknya pecinan di kota-kota pulau Jawa yang mencirikan kebudayaan khas Tionghoa. Di sisi lain penerapan pemukiman tersebut telah meningkatkan rasa solidaritas yang kuat diantara sesama golongan etnis Tionghoa yang menyebabkan rasa eksklusif mereka semakin tinggi. Menurut Kustedja (2012, hlm. 110) kondisi konsentrasi kelompok etnis Tionghoa dalam ruang urban serba terbatas menjadikannya hanya memungkinkan kegiatan dalam bidang perdagangan saja. Hal ini menghasilkan *stad en voorsteden* (kota terdepan) dengan *Chineesche winkelbuurt*, kawasan perdagangan Tionghoa di daerah urban. Pernyataan tersebut dipertegas Adam (2005, tanpa halaman) bahwa ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang China ini paling siap dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek, dan transportasi.

Hal lain yang mendorong terbentuknya eksklusifitas pada golongan etnis Tionghoa ialah bangkitnya nasionalisme Tiongkok di Indonesia pada abad ke-20. “Orang Tionghoa di Jawa, yang terutama terdiri dari Peranakan, menganggap diri

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagian dari bangsa Cina. Orang Tionghoa totok yang merupakan pendatang lebih kemudian dan masih mempunyai hubungan erat dengan negara Cina, dengan sendirinya berorientasi ke tanah tumpah darahnya” (Suryadinata, 1986, hlm. 43). Semangat nasionalisme yang berorientasi kepada negara Tiongkok tersebut kemudian membangkitkan semangat Tionghoa di Indonesia untuk membentuk organisasi yang berorientasi ke Tiongkok bernama Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), serta membangun sekolah-sekolah Tionghoa yang tentunya menggunakan Bahasa Tionghoa dalam pelaksanaan sekolah-sekolah tersebut.

Di samping rasa nasionalisme, rasa percaya diri yang melekat pada etnis Tionghoa pun menjadi salah satu pemicu terbentuknya sifat eksklusifitas. Menurut Willmott (dalam Coppel, 1994, hlm. 44) studi sosiologis di kalangan orang Tionghoa di Jawa telah memperkuat kepastian bahwa banyak dari mereka percaya bahwa pada umumnya orang Tionghoa memiliki kelebihan dalam kemampuan, kecerdasan dan energi ketimbang orang Indonesia. Oleh karena itu, perasaan unggul di kalangan orang Tionghoa di Indonesia terbentuk yang kemudian memunculkan sifat eksklusif, serta bukan hal yang keliru bahwa orang Tionghoa memandang rendah kepada pribumi karena adanya perbedaan status sosial warisan kolonial serta rasa superioritas yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, masalah eksklusif ini pun segera dicarikan solusinya agar pembauran total antara orang Tionghoa dengan pribumi dapat tercapai. Konsep eksklusifitas ini pun sering diperdengarkan kembali oleh tokoh-tokoh Tionghoa yang mendukung jalan asimilasi terhadap orang-orang Tionghoa yang belum sependapat dengan konsep asimilasi tersebut. Tokoh-tokoh asimilasi tersebut menyerukan bahwa orang Tionghoa harus menghilangkan sifat eksklusifnya jika ingin diterima dan melebur seutuhnya sebagai bagian warga negara Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ham (1960) bahwa menuju kearah kesatuan ini hanya dapat dicapai dengan jalan asimilasi, sehingga eksklusivitet dari minoritet hancur. “Eksklusifitas muncul sebagai bentuk mekanisme pertahanan akibat kecemasan yang berlebihan terhadap pengaruh golongan lain atau pihak eksternal yang dapat mengubah paradigma dan prinsip yang telah dipegang” (Barida, 2017, hlm. 1405).

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.5 Asimilasi dan Kebijakan Orde Baru

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti “menjadi sama” (Hendropuspito, 1989, hlm. 233). Dalam bahasa Indonesia, asimilasi memiliki arti sebagai pembauran. Asimilasi menjadi landasan yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam menyelesaikan masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Koentjaraningrat (2002) mengungkapkan bahwa:

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas. Sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaannya lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan mayoritas (hlm. 160).

Selanjutnya Koentjaraningrat (2002) menegaskan tentang bagaimana asimilasi dapat timbul sebagai bagian dari proses sosial:

Asimilasi atau *assimilation* adalah proses sosial yang timbul bila ada: (i) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (ii) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga (iii) kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran (hlm. 255).

Pada konteks masalah etnis Tionghoa di Indonesia, asimilasi merupakan suatu konsep pembaruan di tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda yang kemudian melebur menjadi satu kebudayaan. Lahirnya ide asimilasi orang Tionghoa memiliki proses yang panjang. Ide asimilasi pertama kali diserukan oleh PTI (Partai Tionghoa Indonesia) tahun 1932. Namun konsep asimilasi mulai aktual kembali pada saat terjadi polemik di majalah *Star Weekly* yang memuat mengenai konsep asimilasi tersebut.

Salah satu penggagas ide asimilasi total adalah Ong Hok Ham yang menuangkan pemikirannya ke dalam artikel di majalah *Star Weekly* mengenai **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

asimilasi Tionghoa peranakan. Menurutnya, permasalahan yang terjadi adalah karena orang-orang Tionghoa yang masih bersifat eksklusif, maka perlu diterapkannya suatu pembauran terhadap orang Tionghoa dengan masyarakat pribumi. “Apa yang hanya dapat dikerjakan ialah menciptakan suasana dimana anggota-anggota minoritet ini dapat meleburkan diri dengan jalan mudah, umpamanya dengan jalan perubahan nama, suasana pendidikan, jadi sekolah campuran dan lain-lain” (Ham, 1960, hlm. 48). Pemikirannya tersebut mendapatkan banyak tanggapan dan dukungan. “Bagi para penggagas asimilasi, klimaks dari polemik tersebut dicapai dengan terumuskannya Piagam Asimilasi sebagai hasil dari Seminar Kesadaran Nasional di Bandungan, Ambarawa pada tanggal 13, 14, 15 Januari 1961” (Suryomenggolo, 2003, hlm. 61). Konsep asimilasi kemudian dianggap sebagai satu-satunya solusi dari adanya “masalah Tionghoa” yang terjadi di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ide asimilasi ini, dibentuk suatu organisasi yang menghimpun orang-orang Tionghoa dengan asimilasi sebagai tujuan utamanya, organisasi tersebut ialah Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB).

Pada dasarnya, konsep asimilasi merupakan suatu hal yang terpisah dari persoalan hukum, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Namun, pemerintah Orde Baru memandang bahwa konsep asimilasi ini layak untuk dijadikan solusi. Demi tercapainya suatu pembauran dan untuk menjawab persoalan Tionghoa di Indonesia, maka pada masa pemerintahan Orde Baru, asimilasi dijadikan sebagai sebuah kebijakan politik hukum. Politik asimilasi total yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto mengharuskan orang-orang Tionghoa untuk melebur secara total ke dalam kebudayaan Indonesia di segala bidang. “Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi karakteristik etnis minoritas Tionghoa sehingga mereka dapat berasimilasi dengan ‘populasi pribumi’” (Suryadinata, 1999, hlm. 32). Gagasan asimilasi tersebut kemudian mendapatkan respon dari pemerintah, pada Sidang Umum IV MPRS dinyatakan bahwa asimilasi menjadi kebijakan resmi yang

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dikeluarkan oleh pemerintah. Dari hasil sidang tersebut, didapatkan hasil mengenai resolusi etnis Tionghoa, sebagai berikut.

- a. Resolusi MPRS no. III/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa. Melalui salah satu pasalnya, resolusi ini secara eksplisit menyatakan asimilasi sebagai satu-satunya jalan bagi etnis Tionghoa untuk meleburkan diri.
- b. Resolusi MPRS no. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Resolusi ini secara tegas mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan UU larangan terhadap sekolah-sekolah asing dan agar pemerintah membina kebudayaan daerah-daerah.
- c. Resolusi MPRS no. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan pers. Resolusi ini menyatakan bahwa penerbitan pers dalam bahasa Tionghoa menjadi monopoli pemerintah. Surat kabar “Harian Indonesia” diterbitkan sehubungan dengan itu (Suryomenggolo, 2003, hlm. 77).

Resolusi tersebut menjadi titik tolak kebijakan-kebijakan yang diterapkan kemudian pada pemerintahan Orde Baru, seperti kebijakan penghapusan sekolah-sekolah Tionghoa, menutup pers Tionghoa, melanggar segala bentuk organisasi politik Tionghoa, kebijakan mengganti nama, serta masalah kewarganegaraan orang-orang Tionghoa. Diterapkannya politik asimilasi sebagai awal meleburnya orang-orang Tionghoa yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Tionghoa dan turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Penerapan kebijakan asimilasi ini tidak sepenuhnya mendatangkan dampak yang positif, ada kalanya hal tersebut justru menimbulkan dampak negatif bagi warga masyarakat yang diujarkannya, dalam hal ini ialah etnis Tionghoa di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wibowo (Tanpa Tahun, hlm. 646) bahwa konsep asimilasi tetap menjadi polemik tersendiri setelah diterapkan kepada etnis Tionghoa. Hal tersebut menjadi rumit ketika sebuah konsep asimilasi dijadikan satu politik kebijakan negara, terlebih penerapan konsep asimilasi ini diwarnai dengan strategi dari penguasa untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas politik.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.6 Teori Asimilasi

Terdapat dua pandangan mengenai teori asimilasi, yaitu teori asimilasi Robert Park dan teori asimilasi Milton Gordon. Robert Park melihat proses asimilasi dari migrasi orang-orang Eropa yang menjadi katalisator bagi reorganisasi masyarakat di seluruh dunia. Park (dalam Liliweri, 2005, hlm. 157) mengungkapkan bahwa lingkaran relasi antar ras mengikuti tahap-tahap kontak, persaingan, akomodasi, dan lebih kerap asimilasi. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, diadakan kontak awal antar etnik. Kaum imigran bersama penduduk setempat menyelidiki kemungkinan kerja sama apa yang akan dibentuk; apakah kerja sama itu diwadahi dalam organisasi sosial yang sudah ada, atau perlu dibentuk organisasi sosial baru untuk mewadahi kerja sama itu.
- b. Tahap kedua, hubungan antaretnik memasuki tahap persaingan, dimana etnik pendatang maupun penduduk lokal dibiarkan dan membiarkan diri saling bersaing secara adil untuk memperoleh barang-barang kebutuhan, pekerjaan untuk mencukupi hidup, maupun perolehan sumber daya lainnya.
- c. Tahap terakhir adalah akomodasi, dimana imigran dan kaum petualang digerakan untuk mengubah dan mengadaptasi diri dengan lingkungan baru.

Penjelasan Park mengenai tahapan asimilasi tersebut memang memiliki relevansi dengan kajian etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya ketika etnis Tionghoa pertama kali masuk dan menetap sebagai kelompok minoritas di Nusantara, namun jika dikaitkan dengan topik dan permasalahan pada penelitian ini, penjelasan tahapan asimilasi tersebut kurang memiliki keselarasan. “Menurut Park, kebanyakan kaum imigran memilih langsung melakukan asimilasi dengan penduduk setempat, karena menganggap bahwa berasimilasi dapat melanggengkan relasi daripada akomodasi yang menghasilkan kebersamaan yang tidak stabil” (Liliweri, 2005, hlm. 158). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kelompok pendatang langsung memilih untuk berasimilasi dengan kelompok mayoritas. Pada kasus etnis Tionghoa di Indonesia khususnya permasalahan tersebut, pembauran

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak begitu saja terjadi karena disebabkan beberapa faktor yang menghambat. Bahkan dalam kelompok peranakan sendiri terjadi perpecahan antara golongan integrasionis dan asimilasionis dalam menyelesaikan permasalahan pembauran tersebut.

Terdapat pendapat lain mengenai teori asimilasi, yaitu Gordon dalam teori asimilasi yang ia bangun mengatakan bahwa para pendatang baru (imigran) sudah tentu berasal dari ras dan etnik yang mempunyai tujuan tertentu ke daerah baru sehingga menurutnya kita harus membedakan antara tujuan kedatangan dengan hasil yang mungkin dapat diperoleh dari asimilasi tersebut (Liliweri, 2005, hlm. 160). Pada dasarnya para ahli sosiologi Amerika Serikat menyamakan pengertian antara alkulturasi dan asimilasi. Kedua konsep tersebut dianggap memiliki persamaan yakni mengenai pembauran, akan tetapi perbedaannya asimilasi diartikan pada tahap alkulturasi yang lebih ekstrim. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Pratiwi (Tanpa Tahun) bahwa:

Hal ini berarti bahwa asimilasi, tentu saja, tidak hanya meliputi item-item kultural yang relatif mudah diteliti dan dikenali seperti pakaian, bentuk bangunan, makanan, ataupun bahasa. Namun, asimilasi juga meliputi sejumlah item kultural lainnya, yakni nilai-nilai (*values*), kenangan atau peristiwa masa lalu (*memories*), sentiment-sentimen (*sentiments*), ide-ide (*ideas*), dan sikap-sikap (*attitudes*) (hlm. 6).

Sejalan dengan yang diungkapkan Gordon (dalam Liliweri, 2005) bahwa:

Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa istilah asimilasi lebih sering dipakai para ahli sosiologi, sedang para ahli antropologi lebih suka mempergunakan istilah alkulturasi. Sekalipun kedua istilah tersebut pada dasarnya mengandung pengertian yang sama, tetapi menunjukkan dimensi yang berbeda (hlm. 13).

Gordon (dalam Pratiwi, Tanpa Tahun) mengungkapkan bahwa terdapat multi-tingkatan (*multi-stages of assimilation*) yang terdiri atas tujuh tingkatan, diantaranya ialah:

- a. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural of behavioral assimilation*); berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas;

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini, penerapan kebijakan asimilasi oleh pemerintah Orde Baru tentunya mencakup masalah pola kebudayaan yang dimiliki etnis Tionghoa di Indonesia. Sifat eksklusifitas yang dimiliki etnis Tionghoa dirasa menjadi pemicu dalam proses pembauran yang tidak pernah selesai. Maka dari itu, melalui kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru, etnis Tionghoa diharuskan untuk melebur ke dalam kebudayaan masyarakat pribumi dan dilarang untuk melakukan segala aktivitas kebudayaan yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sifat eksklusif dari etnis Tionghoa yang pada akhirnya akan menghilangkan juga stereotip yang telah muncul pada kelompok tersebut.

- b. Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas;

Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap tahap ini, proses masuknya kelompok etnis Tionghoa ke dalam kelompok masyarakat pribumi secara massif pada masa ini. Hal tersebut terjadi karena ide asimilasi yang dijadikan kebijakan resmi pemerintah Orde Baru secara legal mengharuskan seluruh etnis Tionghoa di Indonesia untuk melebur secara total ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat pribumi, maka dari itu etnis Tionghoa tidak memiliki opsi lain selain melakukan kebijakan asimilasi total tersebut.

- c. Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*); berkaitan dengan perkawinan antar-golongan secara besar-besaran;

Asimilasi melalui perkawinan sebenarnya telah terjadi secara alamiah seiring berjalannya waktu ketika etnis Tionghoa mulai tinggal dan menetap di Indonesia. Meskipun telah terjadi, namun asimilasi perkawinan tidak dilakukan secara massif, artinya masih banyak diantara orang Tionghoa yang ingin mempertahankan keturunannya sebagai “orang Tionghoa” dengan menghindari perkawinan campuran. Asimilasi melalui perkawinan juga sebenarnya dianjurkan oleh para tokoh Peranakan yang mendukung ide asimilasi, mereka

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berpendapat bahwa jika perkawinan campuran dilakukan, maka asimilasi dapat tercapai dengan sempurna. "...sehingga perhubungan-perhubungan minoritet dan mayoritas dipererat dan menambah perkawinan-perkawinan campuran. Dengan demikian maka dapat tercapailah asimilasi biologis..." (Ham, 1960, hlm. 64). Meskipun asimilasi melalui perkawinan tersebut dianjurkan, namun Pemerintah Orde Baru tidak memberlakukan asimilasi melalui perkawinan untuk dijadikan salah satu dari kebijakan resmi. Dalam implementasinya kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru lebih terfokus kepada pembauran secara sosial budaya, politik, dan pendidikan, bukan pembauran secara biologis. Klasifikasi asimilasi perkawinan lebih biasanya terjadi secara alamiah dan cenderung tidak dipaksakan. "Hal ini banyak terjadi bagi mereka (orang Cina) yang paling terdahulu datang di pantai-pantai pulau Jawa tanpa membawa keluarga. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang kawin dengan wanita pribumi (Hidajat, 1993, hlm. 119).

- d. Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas; Ide asimilasi yang diperjuangkan oleh kaum Peranakan sesungguhnya telah memperlihatkan adanya kemauan dari golongan Peranakan untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat pribumi, hal tersebut ditempuh sebagai adanya rasa kebangsaan yang telah dimiliki oleh golongan Peranakan terhadap Indonesia, bahwa mereka ingin diterima serta mendapat pengakuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Begitu pula ketika kebijakan asimilasi oleh Pemerintah Orde Baru diterapkan, disamping terdapat kebijakan politik, namun tujuan kebijakan asimilasi tersebut ialah adanya keinginan untuk menghapus stereotip negatif etnis Tionghoa yang telah tercipta sejak masa kolonial serta menghilangkan sifat eksklusif yang dimiliki etnis Tionghoa demi tercapainya kesatuan di dalam tubuh masyarakat dan menciptakan masyarakat multikulturalisme.
- e. Asimilasi sikap (*attitude receptional assimilation*); menyangkut tidak adanya prasangka (*prejudice*) dari kelompok mayoritas;

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sejak munculnya ide asimilasi dari kalangan peranakan memiliki tujuan untuk menghilangkan prasangka masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa, hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan sebagai langkah pemecahan masalah Tionghoa di Indonesia. Sehingga golongan peranakan pendukung ide asimilasi tersebut mencoba untuk mendapatkan perhatian pemerintah, hingga akhirnya pada masa Pemerintahan Orde Baru, ide asimilasi tersebut dijadikan kebijakan resmi negara. Meskipun ide asimilasi dijadikan kebijakan resmi, namun tujuan menghilangkan prasangka tersebut tampaknya belum sepenuhnya terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan tidak seimbang penerapan kebijakan asimilasi, khususnya dalam bidang ekonomi. Etnis Tionghoa bahkan masih mendapatkan keistimewaan dalam bidang ekonomi yang menyebabkan prasangka masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa tersebut belum hilang.

- f. Asimilasi penerimaan perilaku (*behavior receptional assimilation*); ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas;

Diskriminasi yang terjadi berkenaan dengan kajian etnis Tionghoa pada penelitian ini bukan datang dari kelompok mayoritas, memang pada dasarnya perlakuan diskriminasi oleh pribumi terhadap etnis Tionghoa pernah terjadi. Namun pada kasus masa Pemerintahan Orde Baru ini diskriminasi tersebut justru datang dari pemerintah sebagai yang memegang kendali atas segala kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan asimilasi pada masa Pemerintahan Orde Baru sesungguhnya untuk menghilangkan diskriminasi yang terjadi, namun nyatanya pada proses implementasi kebijakan tersebut pembauran tidak sepenuhnya tercapai, namun diskriminasi bahkan sangat dirasakan etnis Tionghoa pada saat menerapkan kebijakan asimilasi tersebut. Ruang gerak dan segala aktivitas mereka yang dibatasi memberikan dampak yang signifikan dari timbulnya rasa diskriminasi. Dapat disimpulkan pada tahap asimilasi penerimaan perilaku ini, etnis Tionghoa belum sepenuhnya terhindar dari masalah diskriminasi, justru secara tidak langsung kebijakan asimilasi tersebut semakin membatasi ruang gerak dan kedudukan mereka.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

g. Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas; Pada implementasi kebijakan asimilasi yang dikaji dalam penelitian ini, masalah kewarganegaraan juga menjadi sorotan. Masalah kewarganegaraan ini sudah ada sejak masa Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, dimana pada saat itu mayoritas etnis Tionghoa masih memiliki kewarganegaraan ganda. Upaya penyelesaian tersebut terus bergulir hingga masa Pemerintahan Orde Baru. Pengawasan terhadap etnis Tionghoa melalui kewarganegaraannya ditempuh dengan kebijakan bahwa setiap orang Tionghoa yang ingin membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) diwajibkan untuk memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang pada prosesnya memakan waktu yang lama dan SBKRI tersebut cenderung sulit diperoleh. Kebijakan asimilasi Pemerintah Orde Baru melalui kewarganegaraan tersebut pada akhirnya kembali memunculkan diskriminasi, bukan pembauran secara total.

Teori asimilasi Gordon ini sesungguhnya masih diperdebatkan, karena sulit untuk mengaplikasikan ketujuh tingkatan tersebut ke dalam suatu masyarakat tertentu, karena pada hakikatnya setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Gordon juga mengakui bahwa teori asimilasinya tersebut kurang memperhatikan faktor penguasa terhadap kaum imigran. Hal tersebut juga dapat terlihat ketika peneliti menerapkan tahapan asimilasi milik Gordon ini ke dalam kasus etnis Tionghoa pada masa Pemerintahan Orde Baru, bahwasanya dalam penerapan dan proses asimilasi tidak hanya terjadi antara dua kelompok mayoritas dan minoritas saja, namun intervensi penguasa sangat memiliki andil dalam penerapan asimilasi tersebut, bahkan pada kasus etnis Tionghoa dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah yang memiliki kendali penuh terhadap berlangsungnya proses asimilasi. Asimilasi yang terjadi pada kajian ini cenderung dipaksakan bukan terjadi secara alamiah, maka dari itu pada implementasinya terkadang memunculkan suatu masalah baru ketimbang menyelesaikan suatu masalah.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penerapan kebijakan asimilasi Pemerintah Orde Baru yang pada kenyataannya masih menimbulkan masalah tersebut menyebabkan adanya ketidakpuasan dari kedua belah pihak antara pemerintah Orde Baru dengan etnis Tionghoa itu sendiri. Meskipun pemerintah telah berupaya menerapkan kebijakan asimilasi tersebut ke dalam seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa meleburkan dua kebudayaan bukanlah hal yang mudah, diperlukan keterbukaan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempermudah dan mempersulit terjadinya suatu asimilasi, faktor-faktor tersebut ialah:

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi (Soekanto, 1975, hlm. 208) ialah:

- a. Toleransi
- b. Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang.
- c. Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya.
- d. Sikap yang terbuka dar golongan yang berkuasu dalam masyarakat.
- e. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan.
- f. Perkawinan campuran (*amalgamation*).
- g. Adanya musuh bersama dari luar.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghalang-halangi terjadinya asimilasi (Soekanto, 1975, hlm. 210) ialah:

- a. Terisolirnya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat.
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi.
- c. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih superior daripada golongan atau kelompok lainnya.
- d. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri fisik dapat pula menjadi penghalang terjadinya asimilasi.
- e. Suatu *in-group feeling* yang kuat.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- f. Apabila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa.

Dari faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat proses terjadinya asimilasi tersebut, Soekanto menjelaskan lebih detail mengapa asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat diterapkan dengan baik. Menurut Soekanto (1975, hlm. 209) faktor-faktor yang menyulitkan asimilasi antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Indonesia ialah:

- a. Perbedaan ciri-ciri badaniyah.
- b. *In-group feeling* yang sangat kuat pada golongan Tionghoa, sehingga mereka lebih kuat mempertahankan identitas sosial dan kebudayaannya.
- c. Dominasi ekonomi yang menyebabkan timbulnya sikap superior. Dominasi tersebut bersumber pada fasilitas-fasilitas yang dahulu diberikan oleh pemerintah Belanda, dan juga karena kemampuan teknis dalam perdagangan serta ketekunan dalam berusaha.

2.7 Penelitian Terdahulu

Sumber yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya *Kebijakan Negara dan Sentimen Anti-Cina: Perspektif Historis* yang merupakan jurnal karya Ririn Darini yang membahas mengenai analisis tentang kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia kepada etnis Tionghoa hingga munculnya prasangka anti Tionghoa dari perspektif historis yang disajikan secara kronologis. Pembahasan dalam jurnal ini dibagi menjadi tiga sub bab, diantaranya membahas kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, kebijakan pada masa pemerintah Orde Lama, dan yang terakhir pembahasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Jurnal tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana awal timbulnya prasangka anti Tionghoa pada masyarakat pribumi, khususnya pada pembahasan kebijakan pada masa pemerintah Orde Baru. Dijelaskan pada jurnalnya tersebut bahwa pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang lebih strategis, yakni kebijakan asimilasi yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Akan tetapi
Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembahasan mengenai kebijakan asimilasi dalam jurnal tersebut masih dijelaskan secara umum serta tidak dijelaskan secara rinci dampak yang terjadi akibat penerapan kebijakan asimilasi tersebut, maka dari itu dalam penelitian skripsi ini diharapkan akan memperluas kajian mengenai kebijakan asimilasi di berbagai aspek kehidupan serta dapat menambah analisis kajian mengenai dampak penerapan kebijakan asimilasi tersebut.

Masih pada penulis yang sama, Ririn Darini menerbitkan jurnal pada jurnal *Mozaik: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* yang berjudul *Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia 1900-1945*. Sebagai pengantar, dalam jurnalnya tersebut dijelaskan bagaimana awal mula etnis Tionghoa datang dan mulai memiliki kontak dengan masyarakat pribumi, hingga pada perkembangan kehidupan mereka di Indonesia. Pada jurnal tersebut Darini mencoba untuk memandangi munculnya nasionalisme pada etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam perkembangannya, nasionalisme tersebut kemudian berkembang menjadi tiga aliran atau orientasi nasionalisme orang-orang Tionghoa, diantaranya ada yang berorientasi kepada pemerintah kolonial, nasionalisme kepada Tiongkok, dan nasionalisme kepada Indonesia. Analisis mengenai tiga orientasi nasionalisme tersebut memberikan referensi bagi peneliti untuk memahami latar belakang historis terjadinya stereotip antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi yang kemudian memunculkan prasangka anti Tionghoa pada masyarakat pribumi. Dengan kata lain jurnal ini berfokus kepada permasalahan mengenai orientasi nasionalisme yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, penelitian dalam skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prasangka anti Tionghoa yang sangat berpengaruh kepada posisi dan kedudukan etnis Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan, prasangka tersebut yang juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian skripsi ini diharapkan mampu untuk memperkaya kajian mengenai orientasi nasionalisme yang dimiliki oleh etnis Tionghoa di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam jurnal tersebut dalam kaitannya dengan pengaruh orientasi nasionalisme yang dimiliki dengan kehidupan

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mereka di periode-periode selanjutnya, khususnya pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Membahas mengenai posisi dan kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia yang tertuang dalam prosiding tesis yang berjudul *Tionghoa dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis Tentang Posisi dan Identitas* karya Priyanto Wibowo. Pada prosiding tesis tersebut mengangkat permasalahan etnis Tionghoa sebagai minoritas yang tidak pernah lepas dari masalah, khususnya di Indonesia sendiri, sejarah telah mencatat banyaknya kerusuhan yang terjadi dan etnis Tionghoa menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Kerusuhan yang timbul akibat masalah-masalah yang terjadi bukan tanpa alasan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh perspektif historis etnis Tionghoa itu sendiri. Prosiding tesis ini berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas, terutama pada bahasan mengenai asimilasi dan segregasi, serta bahasan mengenai Tionghoa pasca 1998 dan segregasi dalam bentuk baru yang membantu peneliti dalam mengkaji kehidupan etnis Tionghoa pada masa pemerintah Orde Baru, khususnya ketika ruang gerak mereka dibatasi oleh satu kebijakan yang mengikat mereka untuk melakukan pembauran total, atau biasa disebut dengan kebijakan asimilasi Orde Baru. Perbedaan bahasan dalam prosiding tesis karya Priyanto Prabowo dengan penelitian skripsi ini ialah dalam prosiding tesis tersebut fokus kepada bagaimana permasalahan identitas etnis Tionghoa tersebut bergulir serta tidak terlalu banyak membahas mengenai bagaimana penerapan kebijakan asimilasi dapat diimplementasikan, sedangkan dalam penelitian skripsi ini, peneliti membahas bagaimana implementasi dari kebijakan asimilasi tersebut dengan rinci sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada posisi dan identitas etnis Tionghoa di Indonesia, yang nantinya akan dijadi sebagai dampak dari implementasi kebijakan asimilasi tersebut.

Bahasan mengenai masalah identitas yang dialami oleh etnis Tionghoa khususnya masalah kewarganegaraan terdapat pada skripsi Iing Yulianti yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Terhadap Etnis Tionghoa (1955-1969)*. Kajian pada skripsi tersebut membahas mengenai polemik yang terjadi berkenaan dengan krisis **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

identitas yang dimiliki oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa cenderung memiliki status kewarganegaraan ganda, namun kemudian diupayakan mengenai status kejelasan kewarganegaraan tersebut dengan dilakukannya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Skripsi mengenai perjanjian dwi kewarganegaraan ini memberikan referensi dan gambaran terhadap penelitian skripsi ini berkenaan dengan kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru sekitar tahun 1966 mengenai kebijakan mengganti nama etnis Tionghoa menjadi lebih seperti “orang Indonesia” pada awal pemerintahan sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang telah diterapkan pada pemerintahan sebelumnya sesuai dengan kurun waktu yang dipilih pada skripsi Iing Yulianti tersebut, yaitu 1955-1966. Maka dari itu, pada penelitian skripsi ini akan dijelaskan mengenai permasalahan kewarganegaraan yang kembali aktual pada masa Pemerintahan Orde Baru, yaitu permasalahan SBKRI yang harus dimiliki etnis Tionghoa. Hal tersebut kembali memunculkan masalah sebab etnis Tionghoa tidak dengan mudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut diharapkan menambah kajian mengenai masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Seperti yang telah dijelaskan dari berbagai sumber bahwa hubungan masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa telah terjalin sekian lama. Hal tersebut menunjukkan adanya interaksi antara kedua belah pihak tersebut. Pada jurnal *Etnis Cina di Indonesia: Fakta Komunikasi Antar Budaya* karya Robert Siburian memperkuat mengenai adanya interaksi dan komunikasi antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa. Pada jurnalnya tersebut, disebutkan bahwa terjadinya disharmoni dan diskriminasi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada sulitnya bagi etnis Tionghoa mendapatkan ruang gerak dari pemerintah, sebagai contoh dalam mendapatkan pengakuan kewarganegaraan, etnis Tionghoa kala itu harus berjuang meyakinkan pemerintah bahwa mereka bukanlah orang asing yang harus dicurigai dengan segala peraturan-peraturan yang menyulitkan. Kajian dalam jurnal ini sangat berkaitan dengan topik penelitian yang peneliti kaji, terutama dalam **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menganalisis bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia dapat bertahan hidup ketika ruang gerak mereka dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data-data yang ditampilkan pada jurnal ini pula menunjukkan relevansi bagi penelitian ini karena memuat mengenai proses dan dampak yang terjadi setelah implementasi kebijakan pemerintah, khususnya masa pemerintahan Orde Baru. Penelitian skripsi ini bermaksud untuk menganalisis kembali implementasi dari kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru tersebut serta dampak-dampak yang ditimbulkannya, karena pada jurnal ini terlihat belum memuat mengenai dampak dari kebijakan asimilasi tersebut. Diharapkan penelitian skripsi ini dapat memperluas dan memperkaya kajian dari kebijakan asimilasi khususnya pada tahap implementasi serta dampaknya terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia.

Pembauran yang terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Orde Baru yang tidak lain adalah aktor utama dari diterapkannya kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Sesungguhnya penerapan kebijakan asimilasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia dengan cara melakukan pembauran total. Leo Suryadinata dalam jurnal *Kebijakan Negara Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi Ke Multikulturalisme?* menfokuskan kajian terhadap hasil dari penerapan politik asimilasi tersebut sudah mengarah kepada multikulturalisme atau belum. Jika dilihat dari tujuan diterapkannya politik asimilasi, kebijakan tersebut mengarah kepada proses pembauran antara etnik Tionghoa (minoritas) dengan masyarakat pribumi (mayoritas) agar kedua kelompok tersebut pada akhirnya dapat saling menerima dan menyatu sebagai masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Kajian analitis mengenai kebijakan asimilasi tersebut berkaitan dan juga relevan dengan topik penelitian ini yang menganalisis apakah pada akhirnya kebijakan asimilasi tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kedudukan etnis Tionghoa, ataukah sebaliknya. Jurnal ini berfokus kepada konsep asimilasi Pemerintahan Orde Baru itu sendiri terhadap pencapaian masyarakat Indonesia yang multikulturalis. Sementara pada penelitian **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

skripsi ini, disamping membahas mengenai konsep asimilasi etnis Tionghoa di Indonesia, peneliti juga akan membahas bagaimana implementasi dari setiap kebijakan yang dikeluarkan, dengan tujuan permasalahan dapat terlihat sebenarnya mengapa kebijakan asimilasi tersebut masih menimbulkan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia.

Masih berbicara mengenai pembauran, Rochmawati dalam jurnal *Pembauran yang Tak Pernah Selesai* mengungkapkan bahwa masalah pembauran etnis Tionghoa di Indonesia selalu memunculkan suatu perdebatan serta perbedaan pemikiran dalam memandang hal tersebut. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hari Poerwanto dalam jurnal yang berjudul *The Problem of Chinese Assimilation and Integration in Indonesia* bahwa proses asimilasi etnis Tionghoa di Indonesia masih mengalami beberapa masalah. Kedua jurnal tersebut sama-sama menyoroti masalah pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini pula menyoroti aktivitas pembauran yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Kajian pada kedua jurnal ini memberikan gambaran bahwa masalah pembauran tidak akan pernah selesai jika stereotip etnis Tionghoa masih terus ada. Kajian mengenai masalah pembauran yang dianalisis dalam jurnal ini pula membantu peneliti dalam melihat apa yang sebenarnya menjadi penghalang sehingga masalah pembauran tersebut menjadi suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, seperti yang diungkapkan Poerwanto bahwa meskipun etnis Tionghoa sudah berabad-abad tinggal di Indonesia, namun pembauran belum terjadi sepenuhnya. Pada kedua jurnal tersebut juga dikatakan bahwa asimilasi merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang menerapkan kebijakan asimilasi yang dikaji dalam penelitian ini. Serupa dengan jurnal-jurnal lainnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini bahwa implementasi dari kebijakan asimilasi tersebut belum dijelaskan secara rinci, maka dari itu dalam penelitian skripsi ini berusaha mengangkat aspek apa saja yang menjadi sorotan kebijakan asimilasi Pemerintahan Orde Baru tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut

Levia Chessiaga, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenai permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia ini. Namun dalam kedua jurnal tersebut peneliti belum menemukan penjelasan mengenai implementasi dari kebijakan asimilasi Pemerintah Orde Baru tersebut. Meskipun pada jurnal karya Rochmawati disinggung beberapa peraturan kebijakan asimilasi, namun masih dikemas dalam penjelasan yang masih umum. Sedangkan pada jurnal karya Hari Poerwanto masih berfokus kepada permasalahan yang menghambat pencapaian integrasi dan asimilasi, dan belum membahas kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru. Maka dari itu, dalam penelitian skripsi ini, peneliti bermaksud untuk menambahkan kajian tersebut dengan menganalisis implementasi dan dampak dari adanya kebijakan asimilasi Pemerintah Orde Baru.

Penelitian pada skripsi ini berkenaan dengan kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, maka dari itu peneliti menggunakan jurnal yang berjudul *Defining Indonesian Chineseness Under the New Order* karya Christia Chua. Jurnal tersebut membantu peneliti dalam memahami kedudukan dan posisi etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru, khususnya permasalahan etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi yang identik dengan stigma “menjadi Tionghoa” sama dengan “menjadi kaya” yang pada akhirnya berujung pada permasalahan ekonomi. Kajian tersebut dibahas melalui analisis masalah Tionghoa yang terjadi di Indonesia. Dalam jurnal tersebut telah dijelaskan mengenai bagaimana etnis Tionghoa pada masa Pemerintahan Orde Baru, pada penelitian skripsi ini, peneliti bermaksud untuk menambahkan kajian dengan menganalisis kebijakan dalam bidang lain selain ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru, karena dalam jurnal tersebut peneliti belum menemukan pembahasan mengenai kebijakan dalam bidang sosial budaya, Pendidikan, maupun politik.

Masih mengenai kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, dalam jurnal yang berjudul *Indonesian Policies toward the Chinese Minority under the New Order* karya Suryadinata cukup memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Dalam jurnal tersebut juga banyak membahas tentang implementasi dari kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintah Orde Baru, seperti pada kebijakan dalam Pendidikan, kebijakan budaya, kebijakan kewarganegaraan hingga kebijakan ekonomi. Hal tersebut tentunya dapat membantu peneliti dalam menganalisis implementasi dari penerapan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pada penelitian skripsi ini, selain membahas implementasi dari kebijakan asimilasi, peneliti juga bermaksud menambahkan dampak yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, bahwasanya peneliti belum menemukan pembahasan tersebut dalam kajian jurnal ini.

Masih berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru, skripsi yang berjudul *Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa* karya dari Daud Ade Nurcahyo di Universitas Sanata Dharma. Kajian pada skripsi tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dikaji, dalam skripsinya tersebut Nurcahyo mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan oleh pemerintah Orde Baru cenderung diskriminatif ditinjau dari undang-undang yang dikeluarkan dan cenderung membatasi ruang gerak etnis Tionghoa di Indonesia. Bahasan pada kajian skripsi tersebut mencakup aspek sosial dan budaya, ekonomi, dan politik. Meskipun fokus penelitian yang dipilih terlihat sama dengan penelitian skripsi ini, namun terdapat perbedaan dalam isi dari penelitian. Nurcahyo menganalisis kebijakan yang dirasa diskriminatif berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, namun Nurcahyo tidak membahas latar belakang dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut, seperti bagaimana awalnya asimilasi dapat dijadikan sebagai kebijakan resmi Pemerintahan Orde Baru. Sedangkan pada penelitian skripsi ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kehidupan etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru ketika ruang gerak mereka dibatasi ditinjau dari latar belakang mengapa asimilasi merupakan konsep yang dipilih oleh Pemerintah Orde Baru sebagai kebijakan resmi negara, peneliti akan mengkaji kebijakan asimilasi sebagai landasan mengapa kebijakan asimilasi tersebut diterapkan.

Selain itu, tesis yang berjudul *Kebijakan Orde Baru Terhadap Masyarakat Etnis Cina (1966-1980)* oleh Nuraini dari Universitas Indonesia juga melakukan **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kajian dan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Pada pembahasan skripsi tersebut dijelaskan bagaimana pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Nuraini tersebut dapat memberikan referensi kepada peneliti untuk menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Perbedaan yang nampak dari fokus skripsi yang dikaji oleh Nuraini dan penelitian skripsi ini ialah terletak pada periodisasi yang diambil sebagai rentang waktu penelitian. Nuraini mengambil rentang waktu 1966-1980, sedangkan peneliti mengambil rentang waktu tahun 1966-1998 dimana kerusuhan terjadi yang menyebabkan orang Tionghoa menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Selain itu, perbedaan tampak terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan asimilasi dijelaskan pada tesis tersebut. Dalam tesis tersebut hanya dipaparkan secara umum kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru serta tidak menjelaskan mengenai bagaimana reaksi yang timbul dan dampak dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pada penelitian skripsi ini, peneliti bermaksud untuk menambahkan mengenai kajian dari diterapkannya kebijakan asimilasi oleh Pemerintah Orde Baru pada saat itu.

Penerapan kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru mencakup hampir seluruh kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Pada penelitian skripsi ini akan dijelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan asimilasi, salah satunya ialah mengenai kebijakan bagi etnis Tionghoa untuk mengganti nama menjadi nama-nama yang berbaur orang Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan jurnal yang berjudul *Asimilasi Versus Integrasi: Reaksi Kebijakan Ganti Nama WNI (Warga Negara Indonesia) Tionghoa 1959-1968* karya Yunita Retno Kusuma Dewi, yang membahas mengenai reaksi etnis Tionghoa dalam menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Kajian mengenai ganti nama berkaitan dengan awal diusungnya ide asimilasi oleh para tokoh-tokoh Tionghoa bahwa untuk menciptakan harmoni, etnis Tionghoa harus melakukan pembauran total. Kebijakan ganti nama tersebut masih diterapkan ketika masa Pemerintahan Orde Baru berlangsung, maka dari itu jurnal karya Yunita Retno Kusuma Dewi **Levia Chessiagi, 2017**

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian skripsi ini. Perbedaan fokus kajian penelitian skripsi ini dengan jurnal tersebut terlihat bahwa dalam jurnal tersebut hanya mengkaji satu aspek kebijakan saja, serta fokus kurun waktu yang diambil berdasarkan periode selama masa Demokrasi Terpimpin berlangsung hingga memasuki masa Pemerintahan Orde Baru. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, tidak hanya kebijakan ganti nama saja yang menjadi fokus kajian, akan tetapi seluruh implementasi dari kebijakan asimilasi akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, serta kurun waktu yang diambil berbeda dengan jurnal tersebut, bahwa peneliti hanya mengkaji peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu